

## Implementasi Penggunaan Dana Desa Pada Program *Stunting* di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo

Ivan Rasyad<sup>1)</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>2)</sup>, Sri Kamariyah<sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: ivanrsy@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya implementasi alokasi dana desa oleh pemerintah desa dalam penanganan *stunting* sebagai tanggapan terhadap masalah kurang gizi pada anak di bawah lima tahun, yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif serta berdampak negatif pada masa depan Indonesia. Implementasi kebijakan Dana Desa menjadi kunci dalam mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka *stunting*, terutama di Desa Kemiri, Sidoarjo, dengan fokus pada intervensi gizi spesifik dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data serta analisis data berdasarkan metode analisis implementasi kebijakan Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Dana Desa di Desa Kemiri bertujuan untuk mencegah dan mengatasi *stunting* dengan melibatkan langkah-langkah dari Kepala Desa, bidan desa, kader Posyandu, dan masyarakat setempat. Meskipun terdapat kendala seperti pola audit yang belum rapi, sekitar 70% tugas telah berhasil dijalankan. Program penyuluhan dan pemberian makanan sehat bergizi serta vitamin mencapai tingkat keberhasilan sekitar 80%, meskipun sekitar 20% alokasi dana belum terserap. Komunikasi antara kepala desa dan masyarakat setempat terjadi melalui pertemuan rutin, dengan tingkat keberhasilan sekitar 65%. Faktor pendukung meliputi penetapan unit administrasi dan pemastian sumber daya. Namun faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia ahli dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang *stunting* mempengaruhi efektivitas program. Diharapkan, upaya dalam penanggulangan *stunting* terus ditingkatkan di Desa Kemiri.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, *Stunting*

### Abstract

*This research discusses the importance of village governments' implementation of village fund allocations in addressing stunting in response to the problem of malnutrition in children under five years old, which can hinder physical and cognitive development and negatively impact the future of Indonesia. The implementation of Village Fund policies is key in supporting the government's efforts to reduce stunting, particularly in Kemiri Village, Sidoarjo, with a focus on specific and responsive nutrition interventions. This research uses a descriptive qualitative approach involving interviews, observation, and documentation as data collection techniques and data analysis based on the Miles and Huberman policy implementation analysis method. The results show that the implementation of the Village Fund in Kemiri Village aims to prevent and overcome stunting by involving steps from the Village Head, village midwives, Posyandu cadres, and the local community. Despite obstacles such as an unorganized audit pattern, about 70% of the tasks have been successfully carried out. The counseling program and the provision of nutritious healthy food and vitamins achieved a success rate of around 80%, although around 20% of the funding allocation has not been absorbed. Communication between the village head and the local community occurs through regular meetings, with a success rate of around 65%. Supporting factors include establishing administrative units and securing resources. However, inhibiting factors such as the lack of skilled human resources and the community's low understanding of stunting affect the effectiveness of the program. It is hoped that efforts in stunting prevention will continue to be improved in Kemiri Village.*

**Keywords:** Policy Implementation, Village Fund Allocation, *Stunting*

## A. LATAR BELAKANG

Pentingnya peran pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan ini bergantung pada seberapa baik pemerintah desa menjalankan peran, fungsi, dan kewenangannya sebagai pelayan sosial. Aspek finansial menjadi hal penting dalam menjalankan otonomi desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa keuangan desa mencakup hak dan tanggung jawab desa yang dapat diukur dengan uang, termasuk segala hal yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, keuangan, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut undang-undang ini, alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendanaan desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa mengarahkan desa untuk menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan lokal, termasuk pembangunan kesehatan yang berfokus pada program dan permasalahan spesifik masing-masing desa. Salah satu isu yang terus menjadi fokus adalah *stunting*, melalui penataan ini, warga desa berperan aktif dan inovatif dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *stunting*.

*Stunting* disebut juga kurang gizi, merupakan masalah serius akibat kekurangan gizi yang menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan fisik pada bayi (bayi) dan anak kecil (bayi di bawah 2 tahun) di bawah usia lima tahun. Selain bertubuh lebih pendek dari biasanya, anak yang mengalami *stunting* pada masa bayi dan usia dini lebih rentan terserang berbagai penyakit. Akibat *stunting* dalam jangka pendek mencakup pembatasan perkembangan otak, disfungsi pada metabolisme glukosa, lipid, protein, dan hormon Sementara itu, dalam jangka panjang, dampaknya dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan mengurangi kemampuan kognitif pada anak.

Berdasarkan data prevalensi *stunting* yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun

2018, Indonesia menempati peringkat ketiga di antara negara di kawasan Asia Tenggara dengan prevalensi *stunting* sebesar 36,4%. Sebagai perbandingan, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi *stunting* sebesar 36,8% pada tahun 2007, namun menurun menjadi 35,6% pada tahun 2010. Namun pada tahun 2013, prevalensi *stunting* kembali meningkat menjadi 37,2%, dan pada tahun 2018 kembali naik dan kemudian turun 30,8%. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015, prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 29,6% pada tahun 2017. Naik menjadi 30,8% pada tahun 2018, namun turun menjadi 27,7% pada tahun 2019. Teruntuk pada tahun 2021 prevalensi *stunting* berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada skala nasional sebesar 24,4% sedangkan teruntuk Jawa Timur 23,5% dan Kabupaten Sidoarjo sebesar 14,8%, terdapat perkembangan penurunan persentase angka *stunting* untuk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sebesar 16,1% .

Angka *stunting* di Desa Kemiri mencapai 22 anak dan persentasenya sebesar 3,94% pada tahun 2023 per bulan Juni 2023. Meskipun proporsinya relatif rendah, jumlah anak yang menderita *stunting* mencerminkan potensi dampaknya terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak pada Desa Kemiri.

Jika kondisi ini tidak ditangani secara serius, *stunting* dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan generasi Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian di masa depan. Sehingga masalah *stunting* ini menjadi perhatian utama sekaligus penting bagi pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dalam fokus pembangunan nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, yang bertujuan untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing tinggi, salah satu indikator kualitas SDM adalah penurunan angka prevalensi *stunting*. Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat *stunting* melibatkan penggunaan dana desa. Salah satu fokus utama dalam alokasi dana

desa adalah untuk mencegah dan mengatasi masalah *stunting*.

Bukti keseriusan pemerintah dalam menangani masalah *stunting* tersebut telah tertuang dalam Pemberlakuan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 menetapkan bahwa setiap desa wajib mengutamakan pembangunan internal, termasuk di dalamnya pembangunan sektor kesehatan yang disesuaikan dengan permasalahan lokal. Salah satu prioritas utama adalah upaya penanggulangan dan pencegahan *stunting*, dengan melibatkan partisipasi aktif dan inovatif warga desa dalam pelaksanaan berbagai kegiatan terkait. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dikenal sebagai UU Desa, berperan signifikan dalam mendukung upaya konvergensi untuk mencegah *stunting* di pertumbuhan desa.

Salah satu keuntungan dari implementasi UU Desa adalah penggunaan dana desa sebagai sumber pendapatan sejak tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan dan Rehabilitasi Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019, diputuskan untuk memberikan prioritas pada penggunaan dana desa. Peran pemerintah desa memiliki peran penting dalam menurunkan angka *stunting*, sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014. Sesuai peraturan tersebut, desa diharapkan mengembangkan program atau kegiatan yang berfokus pada pencegahan.

Desa sebagai bagian dari ujung tombak pemerintah dalam terwujudnya penekanan angka *stunting*. Desa dapat mengimplementasikan pola tindakan sesuai dengan arahan pemerintah melalui penekanan pada kegiatan intervensi gizi yang bersifat spesifik dan responsif, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Prioritas intervensi gizi yang bersifat spesifik dan responsif, sebagaimana diuraikan dalam Permendes, mencakup peningkatan status gizi keluarga

melalui posyandu untuk ibu hamil dan balita, pelatihan kader mengenai aspek-aspek kesehatan dan gizi, pendampingan dalam praktik pemberian ASI, penekanan pada pentingnya program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), peningkatan kesehatan remaja baik putra maupun putri dengan memberikan perhatian khusus pada pemberian TTD untuk remaja putri, penyediaan akses terhadap air bersih dan sanitasi atau pengelolaan jamban yang sehat, peningkatan ketahanan pangan, penyuluhan, dan perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan keluarga berencana (Peraturan Menteri Desa, 2020).

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Teori Kebijakan Publik

Secara keseluruhan, kebijakan publik berperan sebagai sarana untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan. Dengan demikian, program-program tertentu dapat dianggap sebagai implementasi konkrit dari kebijakan publik. (Hayat, 2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang memiliki dampak mengikat secara luas pada tingkat strategis atau bersifat garis besar, yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan di sektor publik.

Menurut (D Riant Nugroho, 2006) definisi kebijakan publik adalah segala tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, (Makmur, 2011) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat publik, baik mereka yang berkecimpung dalam politik maupun yang berkarier, dengan tujuan menciptakan regulasi dan keteraturan dalam masyarakat untuk mengatur berbagai kegiatan masing-masing individu.

### 2. Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut Perspektif William H. & Dun

Menurut William H. & Dunn, (2018), implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *policy inputs* dan *policy process*. *Policy inputs* merujuk pada sumber

daya yang dimasukkan, sementara *policy process* berkaitan dengan aktivitas administratif dan organisasional yang mengubah masukan kebijakan menjadi hasil dan dampak kebijakan. Dunn juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas, dimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya finansial dan manusia. Dunn menyoroti aspek-aspek penting dalam implementasi kebijakan, seperti kejelasan tujuan, komunikasi, sumber daya, serta faktor-faktor di luar lembaga yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan adalah aspek krusial dalam seluruh proses kebijakan, karena kebijakan publik yang telah diformulasikan akan memberikan manfaat yang nyata ketika diimplementasikan. Pentingnya menerapkan suatu program kebijakan adalah agar program tersebut dapat memberikan dampak yang diinginkan, mencapai tujuan, dan menghasilkan tindakan yang efektif. (Budi Winarno, 2008) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diharapkan oleh pejabat pemerintah.

### 3. Efektivitas Program

Efektivitas berkaitan dengan mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan, terkait dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu dievaluasi berdasarkan produk atau layanan yang dihasilkan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas dinilai dari sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik berhasil dicapai (Fatmariyanti et al., 2023).

Menurut (Wayan Budiani, 2020) menyebutkan beberapa ukuran efektivitas program, antara lain:

- a) Ketepatan sasaran, yang melibatkan kemampuan peserta program untuk mencapai sasaran atau target sesuai dengan kemampuannya.
- b) Sosialisasi program, yang menekankan peran penyelenggara program dalam menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat dan pelaksana program.
- c) Tujuan program, yang berkaitan dengan sejauh mana hasil program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- d) Pemantauan program, yang merupakan kegiatan setelah pelaksanaan program untuk mengevaluasi apakah program telah berjalan dengan baik atau tidak.

### 4. Teori Stunting

*Stunting* adalah salah satu bentuk malnutrisi di mana tubuh mengalami kekurangan nutrisi, terkait dengan defisiensi gizi yang dialami pada masa lampau, sehingga masuk dalam kategori masalah gizi kronis. Status gizi *stunting* dapat diidentifikasi melalui pengukuran tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin pada anak balita (Sutarto et al., 2018).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 1 menjelaskan bahwa *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. *Stunting* ditandai dengan tinggi atau panjang badan anak yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

*World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *stunting* adalah ketidaknormalan pertumbuhan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi, serangan infeksi yang berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial yang memadai. Anak-anak dianggap mengalami *stunting* jika tinggi badan mereka, sesuai dengan usia, berada lebih dari dua standar deviasi di bawah

median Standar Pertumbuhan Anak yang ditetapkan oleh WHO.

## 5. Prioritas Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 menegaskan bahwa setiap Desa diwajibkan untuk memberikan prioritas pada pembangunan di wilayahnya sendiri. Hal ini mencakup berbagai program pembangunan, termasuk dalam sektor kesehatan, yang harus disesuaikan dengan permasalahan yang ada di masing-masing desa. Salah satu kegiatan prioritas adalah penanggulangan dan pencegahan *stunting*, yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dan inovatif warga Desa dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

Skala prioritas desa dalam menggunakan dana desa diimplementasikan melalui intervensi penurunan *stunting* yang terintegrasi. Intervensi ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik langsung menangani penyebab *stunting* dan umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, mencakup aspek-aspek seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.

Sementara itu, intervensi gizi sensitif menangani penyebab tidak langsung *stunting* yang berada di luar sektor kesehatan. Jenis intervensi sensitif mencakup penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta peningkatan akses pangan bergizi. Target intervensi terintegrasi melibatkan pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta peningkatan akses pangan bergizi.

Intervensi gizi spesifik terbagi menjadi tiga kelompok sesuai pedoman pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2018, yaitu intervensi prioritas (dilakukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas dengan dampak paling besar), intervensi pendukung

(berfokus pada masalah gizi dan kesehatan terkait *stunting* setelah intervensi prioritas), dan intervensi prioritas sesuai kondisi (dilakukan pada kondisi tertentu, seperti saat terjadi bencana).

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dampak penggunaan Dana Desa pada program pencegahan *stunting* di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo. Definisi penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, yang diperoleh dari narasi orang-orang atau perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2010:4).

Metode kualitatif deskriptif disesuaikan dengan pandangan bersama antara peneliti dan informan. Pemilihan metode ini dipilih karena analisisnya tidak dapat diekspresikan dalam bentuk angka, dan peneliti lebih cenderung untuk menjelaskan secara rinci semua fenomena yang ada dalam masyarakat.

### 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengidentifikasian dan analisis implementasi penggunaan Dana Desa terhadap program pencegahan *stunting* di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program, alokasi dana, serta peran pemerintah desa dalam upaya menanggulangi *stunting* di tingkat desa tersebut. Melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam program, seperti pemerintah desa, masyarakat setempat, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, dan pihak terkait lainnya, penelitian ini akan menyoroti pandangan dan pengalaman mereka terkait efektivitas penggunaan Dana Desa dalam menangani masalah *stunting* di Desa Kemiri.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada suatu lokasi yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai tempat observasi, penggalan informasi, dan pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, lokasi tersebut menjadi tempat untuk melakukan wawancara dengan narasumber dan mengumpulkan data yang merupakan komponen integral dalam kelengkapan penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Pemilihan Desa Kemiri sebagai lokasi penelitian merujuk kepada data dari Puskesmas Kecamatan Sidoarjo yang menunjukkan jumlah anak *Stunting* di Desa Kemiri sebanyak 22 anak dengan persentase 3,49% yang menduduki posisi ke-6 dari seluruh kelurahan di Kecamatan Sidoarjo. Diperkuat dengan beberapa kali peneliti melakukan observasi bahwasanya kegiatan Posyandu sebagai garda terdepan sekaligus yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar tidak banyak kehadiran dari masyarakat setempat dengan jumlah anak keseluruhan di Desa Kemiri.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Observasi Kegiatan Pencegahan *Stunting* di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo

Hasil observasi terkait proses pencegahan *stunting* di Desa Kemiri menunjukkan adanya beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan *stunting* melalui kegiatan penyuluhan oleh kader Posyandu, masih ditemukan beberapa anak yang berada dalam lingkup indikasi gizi buruk. Hal ini menandakan bahwa meskipun telah ada upaya, namun masih perlu peningkatan dalam efektivitas program pencegahan *stunting* di tingkat desa.

Selain itu, terdapat temuan bahwa beberapa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kader Posyandu tidak dihadiri oleh warga sekitar. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau minat dari

masyarakat terkait dengan pentingnya penyuluhan tentang *stunting*. Ketidakhadiran warga dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu hambatan dalam menyampaikan informasi yang penting terkait pencegahan *stunting*.

Selanjutnya, observasi juga menunjukkan kurangnya pantauan langsung oleh pihak perangkat desa terkait terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kader Posyandu. Kehadiran dan dukungan dari pihak perangkat desa sangat penting dalam memberikan dorongan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *stunting* di tingkat desa. Kurangnya pantauan langsung ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program di lapangan.

Terakhir, ditemukan bahwa transparansi alokasi dana desa yang kurang terperinci membuat kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan tentang pencegahan *stunting* masih dalam perkembangan yang cenderung kurang signifikan. Informasi yang lebih terperinci dan transparan tentang alokasi dana desa dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan lebih banyak dukungan dan pengembangan dalam upaya pencegahan *stunting*. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan detail alokasi dana desa agar dapat mendukung pelaksanaan program pencegahan *stunting* dengan lebih efektif.

### 2. Efektivitas Implementasi Alokasi Dana Desa Program *Stunting* di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, efektivitas program penanggulangan *stunting* di Desa Kemiri dapat dinilai dari beberapa aspek yang meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Kepala Desa telah menetapkan unit administrasi yang bertanggung jawab dan memberikan kewenangan yang diperlukan untuk pelaksanaan program penanggulangan

*stunting*. Meskipun demikian, kendala terkait pola audit hasil dari pelaksanaan kegiatan penanganan *stunting* masih belum rapi dan tertib, yang dapat mempengaruhi efektivitas monitoring dan evaluasi program.

Dalam hal sosialisasi program, desa menggunakan berbagai saluran komunikasi dan melakukan pertemuan rutin dengan warga desa untuk memastikan informasi yang jelas dan akurat disampaikan kepada semua pihak terkait. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala terkait kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang program serta pentingnya Posyandu (Wayan Budiani, 2020).

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan jumlah petugas kesehatan yang terlibat dalam penyuluhan di Posyandu telah dilakukan, tetapi masih ditemui kendala terkait kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam kegiatan penyuluhan. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang bahaya *stunting* dan cara pencegahannya masih kurang memadai, yang dapat mempengaruhi efektivitas penyuluhan dan pemahaman masyarakat tentang program (Wayan Budiani, 2020).

Dari aspek pemantauan program, observasi menunjukkan kurangnya pantauan langsung oleh pihak perangkat desa terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kader Posyandu. Kehadiran dan dukungan dari pihak perangkat desa sangat penting dalam memberikan dorongan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *stunting* di tingkat desa. Kurangnya pantauan langsung ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program di lapangan (Wayan Budiani, 2020).

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan atas hasil penelitian tentang implementasi penggunaan dana desa pada

program *stunting* di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:

- a) Berdasarkan analisis terhadap implementasi Dana Desa di Desa Kemiri untuk mencegah dan mengatasi *stunting* melibatkan berbagai langkah dari kepala desa, bidan desa, kader Posyandu, dan masyarakat setempat. Kepala desa telah menetapkan struktur administrasi dan memberikan kewenangan yang diperlukan, meskipun masih terdapat kendala terkait pola audit hasil yang belum rapi, sekitar 70% dari tugas-tugas ini telah berhasil dijalankan. Bidan desa dan kader Posyandu melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan SOP, namun menghadapi kendala sumber daya manusia yang ahli, dengan tingkat keberhasilan sekitar 60%. Program penyuluhan dan pemberian makanan sehat bergizi serta vitamin telah menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan *stunting*, dan sekitar 80% dari program ini telah berhasil diimplementasikan. Namun, catatan menunjukkan bahwa sekitar 20% dari alokasi dana desa sebesar 2,2 miliar rupiah untuk *stunting* telah terserap, namun ada catatan pada kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya program ini. Komunikasi antara kepala desa dan masyarakat setempat terjadi melalui pertemuan rutin, namun terdapat masalah dalam pemahaman masyarakat tentang program, dengan tingkat keberhasilan sekitar 65%. Meskipun ada kendala, langkah-langkah ini menunjukkan upaya serius dalam mengatasi *stunting* di Desa Kemiri.
- b) Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor pendukung dalam pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di Desa Kemiri melibatkan langkah-langkah seperti penetapan unit administrasi yang bertanggung jawab dan pemastian

ketersediaan sumber daya manusia, materi, dan metode yang diperlukan. Desa juga aktif dalam komunikasi dengan warga melalui berbagai saluran untuk memastikan informasi terkait program tersampaikan dengan jelas. Kegiatan penyuluhan dan pemberian makanan sehat bergizi serta vitamin menjadi fokus, didukung oleh bidan desa dan kader Posyandu. Namun, faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam kegiatan penyuluhan dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang *stunting* mempengaruhi efektivitas program. Untuk mengatasi hal ini, desa telah meningkatkan jumlah petugas kesehatan yang terlibat dalam penyuluhan dan merencanakan sesi penyuluhan tambahan di tingkat desa dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di Desa Kemiri diharapkan terus ditingkatkan untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak di desa tersebut.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian tersebut, peneliti menawarkan beberapa rekomendasi, diantaranya:

### a) Bagi Pemerintahan Desa Kemiri

Mengingat temuan yang menyoroti kendala dalam sumber daya manusia dan pelatihan bagi pelaksana program pencegahan *stunting*, disarankan bagi pemerintahan Desa Kemiri untuk terus memprioritaskan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama bidan desa dan kader Posyandu. Langkah-langkah seperti menyediakan pelatihan yang berkualitas dan dukungan yang memadai akan meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah desa juga perlu untuk terus memantau dan mengevaluasi keberlangsungan program serta

mengidentifikasi kemungkinan peningkatan yang diperlukan.

### b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan fokus pada evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas pelatihan dan dukungan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam program pencegahan *stunting*. Analisis lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi hasil program dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan akan memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat melibatkan studi kasus dari desa-desa lain untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa dalam penanganan *stunting*.

### c) Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat umum di Desa Kemiri diharapkan untuk terus mendukung program pencegahan *stunting* yang dijalankan oleh pemerintah desa. Dukungan aktif dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan penyuluhan, peningkatan kesadaran tentang *stunting*, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya program tersebut akan membantu meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan umpan balik kepada pemerintah desa untuk terus memperbaiki dan meningkatkan program tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal.

## REFERENSI

Alviar, V. (2020). Effective Communication as a Strategic Tool for Public Policy Implementation: A Literature Review. *Asian Journal of Public Affairs*, 13(1), 1–22.

- Arifin.T. (2018). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Bambang, S. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Candarmaweni, & Yayuk, S. R. A. (2020). Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru “New Normal” Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 3(1), 136–146.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *Journal of Public Administration*, 3(2), 132–149.
- Chinman, M., Hunter, S. B., Ebener, P., Paddock, S. M., Stillman, L., Imm, P., & Wandersman, A. (2012). The Getting To Outcomes Demonstration and Evaluation: An Illustration of the Prevention Support System. *American Journal of Community Psychology*, 50(34), 414–428.
- Dewi Prihatini, & I Nyoman Subanda. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akutansi)*, 4(2), 46–59.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. Amerika Serikat: University of Chicago Press.
- Erwan, P., & Agus. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta Pusat: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting. *K I N E R J A*, 18(3), 2021–2383.
- Kevin, Meirza, A., & Dwi, B. B. (2023). Pengaruh PADes, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Stunting (Studi Kasus Desa di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021). *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3393–3405.
- Lee, J., Houser, R. F., Must, A., De Fulladolsa, P. P., & Bermudez, O. I. (2010). Disentangling Nutritional Factors and Household Characteristics Related to Child Stunting and Maternal Overweight in Guatemala. *Economics and Human Biology*, 8(2), 188–196.
- Lestari, P., Pralistami, F., Ratna, D., Hamijah, S., & Harahap, R. A. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 22–37.
- Lexy, J. M. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (3).
- Raikhani, A., Masluchah, L., Fatmaningrum, W., Patmawati, Utomo, B., & Jannah, S. Z. (2022). Implementasi Dana Desa Sebagai Upaya Intervensi Penurunan Stunting Desa Pandan Wangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. *Media Gizi Indonesia*, 17(1), 250–256.
- Setiawan, P. A., & Husain, U. (1995). *Metodologi penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Sutarto, Diana, M., & Reni, I. (2018). Stunting, Faktor Resiko, dan Pencegahannya. *J Agromedicine*, 5(1), 540–545.
- Trihono, dkk. (2015). *Pendek (Stunting) di Indonesia, Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Wayan. B. N. (2020). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Widiastity, W., & Harleli. (2021). Hubungan Pemberian MP-ASI Terhadap Kejadian *Stunting* Pada Balita Usia 6-24 Bulan di Puskesmas Soropia. *Nursing Care and Health Technology Journal*, 1(2), 1–14.
- William, D. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zubair, G. E., & Koton P. Y. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jakarta: CV. Budi Utama.